

# Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis IT di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur

Rimayanda <sup>1\*</sup>, Jauharil Maknuni <sup>2</sup>

<sup>1\*,2</sup> Program Studi Keuangan dan Perbankan Nusantara, Akademi Keuangan Perbankan Nusantara, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia.

\*Correspondence email:  
rimayanda@gmail.com <sup>1\*</sup>

Received: 22 November 2022  
Accepted: 20 December 2022  
Published: 30 December 2022

Full list of author information is available at the end of the article.

## Abstract

The objective of the study was to determine the personnel management system, in particular the Personnel Management Information System (SIMPEG) and the Regional Civil Service Agency (BKD) of Nanggroe Aceh Darussalam. The Government Personnel System is for the smooth running of organizational tasks and becomes a supporting element for the implementation of the functions of the management of an organization, the existence and smoothness of administrative activities. Utilization of information technology can produce efficiency in various aspects of information management as indicated by the speed and timeliness of processing, as well as the accuracy and correctness of the information (validity) produced. The benefit of recording Personnel data is as a means to store personnel data systematically, making it easier to retrieve if needed. Personnel data is processed into staffing information, which is very necessary for employee development materials. Personnel management, both managerial and technical-administrative in nature, is always related to data, in the form of printed or electronic data.

**Keywords:** Information System, Personnel Management, IT Based.

## Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem manajemen kepegawaian Khususnya masalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nanggroe Aceh Darussalam. Sistem Kepegawaian pemerintahan adalah untuk kelancaran tugas organisasi dan menjadi unsur pendukung Pelaksanaan fungsi dari manajemen sebuah organisasi, keberadaan dan Kelancaran aktivitas administrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menghasilkan efisiensi berbagai aspek pengelolaan informasi yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu, pemrosesan, serta ketelitian dan kebenaraninformasi ( validitas) yang dihasilkan. Manfaat pencatatan data Kepegawaian adalah sebagai sarana untuk menyimpan data kepegawaian secara sistematis, sehingga memudahkan penemuan kembali jika diperlukan. Data kepegawaian diolah menjadi informasi kepegawaian, sangat diperlukan untuk bahan pembinaan pegawai. Pengelolaan kepegawaian yang bersifat manajerial maupun teknis administratif selalu berhubungan dengan data, dalam bentuk yang tercetak maupun data elektronik.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi; Manajemen Kepegawaian; Berbasis IT.



## 1. Pendahuluan

Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam lingkup pemerintahan dapat diatur dan dilaksanakan dengan optimal sehingga proses pengelolaan yang dilakukan secara konvensional sudah tidak efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan sistem e-government mencakup pengembangan sistem informasi manajemen di bidang kepegawaian yang dikenal dengan istilah SIMPEG. Dengan penggunaan SIMPEG diharapkan proses pelaksanaan PNS berlangsung lebih optimal, efisien dan efektif. setiap sistem memberikan informasi yang akurat kepada user, perubahan dan dinamika masyarakat yang semakin cepat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi sehingga memerlukan kualitas informasi yang akurat, cepat dan tepat. Perkembangan teknologi informasi menciptakan perangkat-perangkat yang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan mudah, instansi dan organisasi saat ini sudah banyak menggunakan teknologidalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan tersebut (Eja, 2022). Teknologi dan informasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan pada saat ini. Hal ini terlihat dari proses untuk mendapatkan informasi yang dapat diperoleh secara cepat, tepat, dan akurat dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih (Abdurahman, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan untuk menuju good governance. Dengan penggunaan sistem informasi dimungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan dan fungsi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang baik, termasuk otomatisasi dalam penanganan sistem kepegawaian. Menurut Sutabri (2012) sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kebutuhan informasi yang cepat dan akurat sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya setiap fungsi dari unit organisasi. Maka dari penjelasan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem manajemen kepegawaian Khususnya masalah Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis IT di Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Aceh Timur.

## 2. Metode

Metode penelitian Studi Pustaka, dimana dibutuhkan untuk mencari referensi berupa pustaka yang berkaitan dengan perancangan aplikasi dalam bentuk data dokumen teks maupun pemrograman. Penulis mencari berbagai referensi buku dan jurnal yang memiliki studi kasus yang hampir mirip dengan ini untuk menambah pengetahuan dan inspirasi. Tahap pengumpulan data. Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data dan menganalisa sistem yang berjalan, perancangan sistem, pembuatan sistem, dan melakukan pengujian sistem (Moleong, 2017) berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan upaya untuk menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun tanda fenomena tertentu.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis IT Di Kantor kementerian Agama Kab. Aceh Timur

Salah satu unsur pendukung pelaksanaan fungsi manajemen adalah sebuah Organisasi, keberadaan dan kelancaran aktifitas pegawai dalam kegiatan organisasi tersebut. Sistem Kepegawaian dipemerintahan adalah untuk kelancaran tugas organisasi dan menjadi unsur pendukung Pelaksanaan fungsi dari manajemen sebuah organisasi, keberadaan dan Kelancaran aktifitas administrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menghasilkan efisiensi berbagai aspek pengelolaan informasi yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu, pemrosesan, serta ketelitian dan kebenaran informasi (validitas) yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan perangkat keras komputer(hardware), program aplikasi pendukung (software), perangkat komunikasi dan internet sebagaisarana pengelolaan informasi. Sistem informasi manajemen kepegawaian merupakan suatu aplikasi perangkat lunak (software) yang dipergunakan untuk mengelola data-data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dan menyeluruh.

Menurut (Pegawai, 2020) memang sistem informasi sudah berjalan walaupun tidak sesempurna mungkin, tapi kita semua sudah tersistemkan. Beberapa fitur utama yang tersedia pada aplikasi ini diantaranya pengelolaan data umum, pengelolaan data mutasi, pengelolaan data pegawai, pengelolaan data laporan, pengelolaan data surat keputusan, serta manajemen data pengguna aplikasi. (Pegawai, 2020) biasa kalau guru

semua yang PNS jika ada kendala pada sistem pasti langsung ke kekantor. Di beberapa fitur-fitur yang telah disebutkan, Sistem Informasi Kepegawaian menyediakan fasilitas untuk mencetak data sebagai bahan untuk laporan. Sistem informasi manajemen kepegawaian dalam BKN (Badan Kepegawaian Negara) merupakan implementasi E-Government dalam pelayanan BKN di bidang kepegawaian secara transparan dan objektif. Sistem ini selain menyajikan informasi yang terkait dengan kepegawaian, khusus untuk meningkatkan pelayanan di bidang mutasi kepegawaian. Sistem informasi manajemen kepegawaian bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di BKN. Permasalahan yang ada diantaranya adalah PNS yang status kepegawaiannya tidak jelas, hal ini menggambarkan buruknya administrasi kepegawaian yang ada, PNS yang sudah pensiun, meninggal atau berhenti data kepegawaiannya tidak diperbaharui. Data PNS tidak up to date, sehingga jumlah PNS tidak diketahui secara pasti, dan data yang ada saling berbeda, pemutakhiran data tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik di instansi, maupun Pemerintah Daerah.

### 3.2 Tujuan Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen (SIM) muncul di tahun 1970-an untuk memusatkan pada sistem informasi berbasis-komputer bagi para manajer. (Pegawai, 2020) tujuan semua untuk memudahkan semua. SIM mengkombinasikan teori-teori pengetahuan computer, pengetahuan manajemen, dan operasi riset dengan suatu orientasi praktis ke arah pengembangan solusi sistem atas permasalahan nyata dan mengelola sumber-sumber teknologi informasi. Juga perlu diperhatikan isu-isu perilaku yang melingkupi pengembangan, penggunaan, dan dampak sistem informasi yang disebabkan oleh sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Sistem informasi manajemen kepegawaian sebagai implementasi E-Government dalam pelayanan BKN di bidang kepegawaian bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada dan untuk menyajikan informasi yang terkait dengan kepegawaian serta mengatur segala jenis bentuk permasalahan PNS yang menjadi salah satu akibat membengkaknya keuangan Negara. Meningkatkan efektivitas kegiatan pengolahan data kepegawaian agar lebih terarah dan terpadu, serta mempermudah operasi dalam mengolah data yang berhubungan dengan segala ketentuan kepegawaian.

### 3.3 Pencatatan data Kepegawaian

Manfaat pencatatan data Kepegawaian adalah sebagai sarana untuk menyimpan data kepegawaian secara sistematis, sehingga memudahkan penemuan kembali jika diperlukan. Data kepegawaian diolah menjadi informasi kepegawaian, sangat diperlukan untuk bahan pembinaan pegawai. (Pegawai, 2020) semua data tersimpan di sistem kalau misalkan perlu mudah untuk mengakses. Pengelolaan kepegawaian yang bersifat manajerial maupun teknis administratif selalu berhubungan dengan data, dalam bentuk yang tercetak maupun data elektronik. Kegiatan administrasi kepegawaian akan berpengaruh pada keadaan data perorangan pegawai maupun keseluruhan. Seringkali perubahan-perubahan yang terjadi tidak segera diketahui para pelaksana administrasi yang lain. Keberadaan perangkat komputer tidak banyak membantu karena data disimpan dan dikelola oleh masing-masing pelaksana dan tidak ada kesatuan platform dalam penyimpanannya.

Akibatnya dalam hal data pokok sekalipun, bisa perlu waktu lama untuk menemukannya bahkan terjadi kesalahan. Sangat penting peranan Data Kepegawaian dalam rangka melaksanakan Pembinaan pegawai Negeri Sipil sehingga perlu adanya Pembentukan sistem pencatatan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Secara Manual Merupakan pelaksanaan kegiatan pencatatan, penyimpanan dan pengolahan dilaksanakan secara manual, dengan media Buku Induk, File / Tata Naskah perorangan yang disimpan dalam unit almari khusus.
- 2) Secara Elektronik Merupakan pelaksanaan kegiatan perekaman dan penyimpanan dalam Media Komputer Berdasarkan keadaan di atas, dibangun suatu program aplikasi komputer yang kita namakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian disingkat SIMPEG.

Program ini memungkinkan kita menghimpun data tiap PNS, merekam perubahan yang terjadi, serta menyimpannya dalam satu himpunan data (disebut database). Dari database tersebut bisa dijadikan sumber data dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian maupun output yang dapat dijadikan informasi untuk membantu pembuatan kebijakan kepegawaian.

### 3.4 SIMPEG

Yang dimaksud dengan SIM adalah segala sesuatu yang menyangkut perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan penggunaan alat bantu teknologi informasi untuk membantu manusia dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan dan pengelolaan informasi.

- 1) Komponen SIM
  - a. Manajemen

- b. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Karenanya, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
- c. Teknologi Informasi (hardware dan software)
- d. Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya.

Informasi Sumber Daya Manusia (*brainware*) Sedangkan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Pegawai) didefinisikan sebagai Sistem Informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. Lingkup Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

- a. Sistem informasi dan aplikasi
- b. Sarana komputer dan penunjang
- c. Sarana komunikasi
- d. Organisasi dan Sumber Daya Manusia pelaksana
- e. Pembiayaan
- f. Dukungan Manajemen

Hamzah (2021) Keberadaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam suatu instansi pemerintah mulai mendapatkan perhatian yang serius. Pemakaian SIMPEG yang dilakukan secara optimal mampu memberikan dampak positif dalam instansi tersebut. SIMPEG yang diterapkan dengan baik mampu memberikan arahan dalam pengambilan keputusan, hal ini tidak terlepas dari fungsi SIMPEG, yaitu: melakukan pengumpulan data, menganalisis data dan memberikan hasil analisis data secara aktual dan faktual terhadap kinerja pegawai secara real time.

## 2) Tujuan dan Manfaat SIMPEG

Di Lingkup Pemerintahan Sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal dan terintegrasi secara nasional dapat menjawab berbagai informasi tentang PNS yang dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan untuk perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan PNS. Sistem informasi manajemen kepegawaian dapat menjamin penyelenggaraan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian baik secara organisasional, wilayah maupun nasional dan pada gilirannya menjadi perekat bangsa dalam NKRI (Faisal, 2017). Perusahaan menuangkan segala informasi didalamnya melalui sistem, hal ini tentu membutuhkan sumber daya manusia sebagai penyediannya (Ardhana, 2019). Uji coba yang telah dilakukan adalah data kepegawaian telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghasilkan data yang akurat

Mewujudkan data PNS yang akurat di setiap instansi baik di pusat maupun daerah yang terintegrasi secara nasional dan untuk bahan dalam penyusunan standar kompetensi dan klasifikasi jabatan. Meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian secara transparan dan objektif sehingga setiap PNS dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang kepegawaian. Mewujudkan identitas tunggal (*multi guna*), kartu pegawai elektronik dalam bentuk *smart card* yang mendukung peningkatan mutu, pelayanan kepegawaian dan kesejahteraan PNS secara nasional.

## 4. Kesimpulan dan Saran

Sistem Kepegawaian dipemerintahan adalah untuk kelancaran tugas organisasi dan menjadi unsur pendukung Pelaksanaan fungsi dari manajemen sebuah organisasi, keberadaan dan Kelancaran aktifitas administrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menghasilkan efisiensi berbagai aspek pengelolaan informasi yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu, pemrosesan, serta ketelitian dan kebenaran informasi (*validitas*) yang dihasilkan. Manfaat pencatatan data Kepegawaian adalah sebagai sarana untuk menyimpan data kepegawaian secara sistematis, sehingga memudahkan penemuan kembali jika diperlukan. Data kepegawaian diolah menjadi informasi kepegawaian, sangat diperlukan untuk bahan pembinaan pegawai. Pengelolaan kepegawaian yang bersifat manajerial maupun teknis administratif selalu berhubungan dengan data, dalam bentuk yang tercetak maupun data elektronik

Berbagai jenis aplikasi yang sudah diciptakan oleh BKN yang sudah dijelaskan diatas harus direalisasikan dengan baik agar system informasi manajemen kepegawaian sebagai implementasi E-

Government dalam pelayanan BKN di bidang kepegawaian dapat diwujudkan dan dilaksanakan dengan lancar sehingga permasalahan-permasalahan yang ada pada PNS dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi lagi kesalahan sehingga menyebabkan permasalahan yang sering timbul dan merugikan pegawai negeri sipil serta keuangan Negara.

## Referensi

- Abdurahman, M. (2018). Sistem Informasi Data Pegawai Berbasis Web Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO - Ilmu Komputer & Informatika*, 1(2). DOI: <https://doi.org/10.47324/ilkominfo.v1i2.10>
- Ardhana, V. Y. P. (2019). Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Web di BPR Kabupaten Lombok Tengah. *SainsTech Innovation Journal*, 2(1), 1–4. DOI: <https://doi.org/10.37824/sij.v2i1.2019.113>
- Eja,.E. Kristianus Jago Tute, & L.B Finansius Mando. (2022). Sistem Informasi Kepegawaian pada Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende Berbasis Web. *SATESI: Jurnal Sains Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 101–107. DOI: <https://doi.org/10.54259/satesi.v2i2.1122>
- Faizal, S.L Putri, (2017) Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai Berbasis Web di PT Perkebunan Nusantara VIII Tambaksari, *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*,. ISSN : 2252-4517
- Hamzah, Ana Sriekaningsih, & Lina Warlina. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan. *AKUNTANSI '45*, 2(2), 81–89. DOI: <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v2i2.117>
- Moleong, Lexy (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pengawai, (2020). *IT di Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Aceh Timur*.
- Sutabri, T., .(2012). "Konsep Sistem Informasi". Yogyakarta: Andi Offset.

## How Cites

Rimayanda, & Maknuni, J. (2022). Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis IT di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 54–58. <https://doi.org/10.58477/ebima.v1i2.54>.

## Publisher's Note

Yayasan Pendidikan Mitra Mandiri Aceh (YPPMA) remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Submit your manuscript to YPMMA Journal and benefit from: <https://journal.ypmma.org/index.php/ebima>.